



Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 di Kec. Binjai Kota di Kota Binjai

Nadia Ananda*, Mia Aulina Lubis

Universitas Sumatera Utara

Abstrak

Pandemi Covid-19 menjadi masalah yang menyulitkan berbagai bidang di seluruh dunia. Aspek terbesar yang dipengaruhi oleh adanya virus Covid-19 adalah aspek ekonomi. Hal ini menjadikan masyarakat di Indonesia terkena dampak ekonomi tersebut yang mempengaruhi pekerjaan dan penghasilan masyarakat Indonesia. Kondisi ini yang menjadikan dikeluarkannya Program Bantuan Langsung Tunai Covid-19 untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka, bantuan ini dibagikan kepada masyarakat melalui pihak kecamatan Binjai Kota. Secara konseptual bantuan sosial dimaksudkan untuk meringankan anggota masyarakat yang tidak mampu dan telantar agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga dapat mempertahankan bahkan mengembangkan dirinya sebagai manusia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi bantuan langsung tunai (BLT) Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Melalui metode ini ditemukan hasil penelitian bahwa mengacu pada teori Edward III terkait implementasi program, dalam komunikasi baik dari transmisi, kejelasan dan konsistensi sudah baik meski kuantitasnya belum maksimal. Sumber Daya Manusia dalam implementasi BLT Covid-19 ini adalah pihak kecamatan dimana tidak ada SDM khusus yang direkrut ataupun dilatih. Dalam struktur birokrasi dan disposisi untuk Program Bantuan Langsung Tunai telah sesuai dengan SOP yang diberlakukan.

Kata Kunci: Implementasi, Covid-19, Bantuan Langsung Tunai

Abstract

The Covid-19 pandemic is a problem that complicates various fields around the world. One of the biggest aspect that affected by the presence of the Covid-19 virus is the economic aspect such as termination and income of Indonesian people. This condition led to the issue of direct cash assistance or also known in Indonesia as BLT Covid-19. This direct cash assistance program are created to help people to fulfill their needs. Conceptually, this assistance is intended to relieve the poor and neglected society in order to be able to meet their basic needs so that they can maintain and even develop themselves as human beings. This study aims to look at the implementation of BLT Covid-19 program. The research method that used is qualitative method. Through this method, research results were found that referring to Edward III's theory regarding program implementation, in good communication from transmission, clarity and consistency were good even though the quantity was not maximal. In human resources aspect, there is no special human resources that recruited or trained. The implementor in this program is non trained sub-district officer. Lastly, the bureaucratic structure and disposition for the Direct Cash Assistance Program are in Accordance with the Applicable Operation Standard Procedures.

Password: Implementation, Covid-19, Direct Cash Assistance

How to Cite: Ananda, N., & Lubis, M. A. (2022). Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 di Kec. Binjai Kota di Kota Binjai. *Jurnal Intervensi Sosial*, 1(2), 69-78

*Corresponding author: Nadia Ananda

E-mail: nadia.ananda712@gmail.com

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia 1 etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pandemi COVID-19 mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek pendidikan, kesehatan dan aspek ekonomi di tingkat global. Performa sebagian besar sektor industri mengalami penurunan. Pada aspek ekonomi banyak masyarakat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya karena terhambat pandemic COVID-19, contohnya para pedagang harian yang biasanya memenuhi kebutuhan dengan pendapatannya yang berjualan namun tidak dapat dilakukan ketika diberlakukan lockdown dan fakta bahwa terjadinya PHK atau pemutusan hubungan kerja yang terjadi karena pandemic menyebabkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaannya pada masa sulit

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2020), kemiskinan di perkotaan mencapai 7,38 persen, naik dari September 2019 yang sebesar 6,56 persen. Sementara di perdesaan kemiskinan mencapai 12,82 persen, naik dari September 2020 sebesar 12,6 persen. Kemiskinan sudah menjadi masalah yang kompleks di negara Indonesia bahkan sebelum adanya Pandemi COVID-19. Menindaklanjuti dampak yang ditimbulkan oleh segi ekonomi terhadap menurunnya pendapatan masyarakat maka diberlakukanlah BLT COVID-19. Dalam penerapan program ini, tujuannya adalah untuk memenuhi kelangsungan hidup dari masyarakat yang terdampak COVID-19, khususnya masyarakat yang kurang mampu. Bantuan Langsung Tunai ini diberikan oleh Kemensos kepada masyarakat yang telah terdaftar dan diverifikasi oleh Dinas Sosial Kota Binjai dan disalurkan oleh Kantor POS yang berjumlah Rp.300.000/bulan. Penerima Bantuan Sosial Tunai di Kecamatan Binjai Kota berjumlah sekitar 1975 KPM dan penerima bantuan ini berubah-ubah jumlahnya setiap tahap pembagian karena adanya beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan lagipada program yang berbeda maka menghindari hal tersebut setiap bulannya dilakukan pengecekan ulang oleh Kantor Camat Binjai Kota agar pembagian bantuan tersebut tepat sasaran. Kecamatan Binjai Kota

Ananda, N., & Lubis, M. A. (2022). Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 di Kec. Binjai Kota di Kota Binjai.

merupakan pusat dari perekonomian dan bisnis di Kota Binjai. Penduduk yang tinggal di Kecamatan Binjai Kota sebagian besar berprofesi sebagai pedagang, maka ketika adanya pandemi COVID-19 yang menghambat mereka berdagang untuk kehidupan sehari-hari maka mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan. (Badan Pusat Statistik Kota Binjai).

Secara konseptual bantuan sosial dimaksudkan untuk meringankan anggota masyarakat yang tidak mampu dan telantar agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga dapat mempertahankan bahkan mengembangkan dirinya sebagai manusia. Bantuan bisa bersifat sementara karena situasi sosial tertentu seperti; bencana, resesi ekonomi, atau adanya kebijakan tertentu dari pemerintah yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang paling terdampak pandemi COVID-19, meliputi masyarakat miskin, pekerja informal serta pelaku usaha transportasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian dengan tujuan menggambarkan objek dan fenomena yang diteliti. Termasuk di dalamnya bagaimana unsur-unsur yang ada dalam variabel penelitian itu berinteraksi satu sama lain dan apa saja produksi interaksi yang berlangsung. Pada umumnya, penelitian deskriptif sudah dilandasi konsep dan teori yang memadai, hanya saja peneliti bertujuan sebatas menggambarkan fenomena yang ada dalam setiap unsur, tetapi tidak sampai pada analisis statistik inferensial (Siagian, 2011:52). David Williams (dalam Moleong, 2010: 31) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah kumpulan data pada suatu latar ilmiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara ilmiah.

Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010: 37) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jelas dalam definisi ini menggambarkan bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar belakang alamiah, agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena, dan metode yang biasanya digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif untuk memahami fenomena yang

dialami oleh objek penelitian serta melihat dan menggambarkan dampak bantuan langsung tunai terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Binjai Kota.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Bantuan Langsung Tunai Covid-19 di Kec. Binjai Kota Kota Binjai

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan terdampak Covid-19. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, pemerintah membuka akses keluarga miskin untuk mendapatkan bantuan secara berkala dalam bentuk uang tunai. Tujuan dari Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini sendiri adalah sebagai upaya pencegahan karena menurunnya kondisi ekonomi Indonesia pada masa Pandemi Covid-19.

Di Kota Binjai sendiri, terdapat sekitar 22.676 orang yang masuk kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), didalamnya termasuk mereka yang mendapat Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 5000 lebih. Ada sekitar 22.676 orang yang saat ini masuk kedalam DTKS, 5000 lebih di antaranya merupakan mereka yang menerima bantuan reguler seperti PKH dan lainnya, artinya ada sekitar 17.000 lebih kepala keluarga. yang akan menerima dana BLT Covid-19 sebesar Rp. 300.000.

Implementasi bantuan langsung tunai covid-19 yang ada di kota Binjai dilihat melalui teori implementasi yang diungkapkan oleh Edward III (Agustino, 2006:157) yang mengatakan bahwa baik buruknya implementasi dinilai melalui unsur komunikasi, sumberdaya serta struktur birokrasi dan disposisi.

1. Komunikasi (*Communication*)

Menurut Agustino (2006:157), Transmisi penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan (*tidak ambigu/ mendua*). Menurut Theodore Herbert (Rizal:2018), yang mengatakan bahwa komunikasi merupakan proses yang di dalamnya menunjukkan arti pengetahuan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain dengan maksud mencapai beberapa tujuan khusus. Menurut Edward III (dalam Novianti, 2018) hal yang harus dipenuhi dalam indikator komunikasi dilihat dari 3 aspek yaitu:

A. Transmisi

Transmisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang artinya adalah penerusan pesan dari seseorang kepada orang lain, maka komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan. Aspek komunikasi ini untuk melihat bagaimana pola komunikasi dan pemahaman yang diberikan oleh Pemerintah terkait Program Bantuan Langsung Tunai ini kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terkait komunikasi program bantuan langsung tunai kepada Informan Utama I mengatakan informasi terkait program bantuan langsung tunai tersebut didapatkan melalui kepala lingkungan Menurut Hasil wawancara dengan Informan ke II ia menyatakan menerima informasi tersebut dari Kepala Lingkungan.

B. Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/nebdua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan (Novianti, 2018). Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan Utama II menyatakan beliau menerima informasi pihak kecamatan dan Kepala Lingkungan informasi yang ia dapatkan jelas terkait syarat – syarat yang harus dipenuhi, beliau juga pernah menghadiri sosialisasi yang dilakukan oleh kepala lingkungan terkait Program Bantuan Langsung Tunai tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Informan Kunci terkait komunikasi di Program Bantuan Langsung Tunai memang benar diadakan sosialisasi dengan tujuan mengarahkan masyarakat dari tahap awal pengajuan mendapat bantuan sampai bagaimana cara mengambil bantuan tersebut, melalui pihak kecamatan, kelurahan serta kepala lingkungan turut membantu penyebaran informasi.

C. Konsistensi

Hasil wawancara dengan Informan I menyatakan ia menerima informasi mengenai Program Bantuan Langsung Tunai tersebut lebih dari sekali yang pertama informasi yang didapat melalui pihak kecamatan lalu ia menerima informasi lagi dari Kepala Lingkungan, sama halnya dengan Informan Utama III yang menyatakan beliau menerima informasi tersebut dari Kepala Lingkungan yang menginformasikan kepada masyarakat lingkungan tersebut sekitar 3-4 kali.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Menurut Agustino (20016:158-159) Kebutuhan untuk profesionalisme sumber daya manusia dan aktivitas yang mereka lakukan dapat memberikan kontribusi pada suksesnya usaha dan dapat memberikan daya saing perusahaan/organisasi atas produktivitas, kualitas dan jasa pelayanan. Aspek sumber daya ini dinilai dari bagaimana dampak dari program bantuan langsung tunai ini. Menurut Edward III (dalam Novianti, 2018) hal yang harus diperhatikan dalam Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

A. Staff

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Informan Kunci bahwa peran pihak kecamatan dalam aspek sumber daya yaitu pemerintah setempat memberikan pelayanan yang sebagaimana diarahkan dengan proses yang sudah diatur dan dibawah oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum. Hasil wawancara peneliti terhadap Informan Utama I yaitu beliau mengatakan pelayanan pihak terkait yang ia ketahui yaitu kecamatan, kelurahan dan BPBD yang memberikan pengarahan dan pelayanan dan beliau menyatakan jumlah staff yang bertugas di Program ini cukup.

B. Informasi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Informan Kunci bahwa peran pihak kecamatan dalam aspek sumber daya yaitu pemerintah setempat memberikan pelayanan yang sebagaimana diarahkan dengan proses yang sudah diatur dan dibawah oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum yaitu pihak kecamatan akan mendata berkas Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ada di Kecamatan Binjai Kota lalu akan diverifikasi lagi oleh Dinas Sosial kelayakan penerima bantuan apakah memang benar kategori miskin atau terdampak pandemi *Covid-19*.

Ananda, N., & Lubis, M. A. (2022). Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 di Kec. Binjai Kota di Kota Binjai.

Berdasarkan hasil wawancara Informan Utama I Beliau menyatakan keluhan yang ada terkait kesalahan pada pendaftaran untuk Keluarga Penerima Manfaat yang masuk kategori Lansia pernah mengalami kesalahan dalam mendaftarkan bantuan.

C. Wewenang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan Kunci, Kepala Lingkungan dan TKSK memiliki wewenang dan ditugaskan untuk berhubungan langsung dengan masyarakat terkait membantu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam alur proses Program Bantuan Langsung Tunai. Selanjutnya berdasarkan pernyataan Informan Utama III TKSK membantu langsung dalam memberikan pengarahan dan informasi terkait Program Bantuan Langsung Tunai.

D. Fasilitas

Hasil wawancara peneliti terhadap Informan Utama I yaitu ada dampak positif dari Program Bantuan Langsung Tunai ini terhadap beliau dan keluarga dari segi ekonomi meskipun bantuan ini tidak diberikan dalam jumlah yang besar namun dengan jumlah yang diterima setidaknya dapat menolong pemenuhan kebutuhan keluarga. Selanjutnya Informan Utama III dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa beliau menyatakan

3. Struktur Birokrasi dan Disposisi (*Disposition*)

Menurut Winarno (2005:142-143) Disposisi atau sikap dan pelaksanaan kebijakan adalah faktor penting ketiga suatu kebijakan publik cara seseorang pemimpin dalam memberdayakan bawahannya adalah pemimpin mempercayai bawahannya untuk bisa melakukan lebih banyak karena potensi yang dimilikinya. Membuat standar operating prosedur (SOP). Hasil wawancara peneliti kepada Informan Kunci yaitu beliau menyatakan bahwa struktur birokrasi untuk Program Bantuan Langsung Tunai itu sesuai dengan SOP yang diberlakukan. Hasil wawancara dengan Informan Utama III beliau menyatakan pemerintah berperan aktif dan fungsional dalam melaksanakan program bantuan langsung tunai ini beliau menyatakan alur proses program bantuan langsung tunai ini tahapnya

Faktor Penghambat Implementasi Bantuan Langsung Tunai

Dalam setiap pelaksanaan suatu program pasti selalu ditemukan penghambat-penghambat yang terjadi di dalamnya. Untuk mencapai suatu targetan yang akan dicapai dalam menjalankan sebuah program tidak bisa dikatakan mudah walaupun semua kegiatan tersebut sudah dilakukan secara maksimal. Untuk mendapatkan hasil yang akan dicapai maka diperlukan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan yang menyebabkan pelaksanaan program tersebut berjalan dengan tidak sesuai dan apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya begitu juga yang dialami dalam Implementasi Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Binjai Kota Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Binjai Kota mengemukakan faktor-faktor apa yang menjadi penghambat Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Binjai Kota sebagai berikut :

1. Data yang tidak sesuai

Data yang tidak sesuai pada pendaftaran Program Bantuan Langsung Tunai ini yakni kesalahan pendaftaran dalam penerimaan bantuan, Contohnya masyarakat lanjut usia (Lansia) yang memiliki programnya sendiri yaitu Program Bantuan Untuk Lansia mendaftar ke Program Bantuan Langsung Tunai ketika bantuan nya tidak disetujui maka mereka langsung dialihkan ke bantuan yang memang dikhususkan untuk KPM Lansia.

2. Sosialisasi yang terbatas

Sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak kelurahan dan kepala lingkungan tidak bisa rutin dilakukan mengingat adanya PPKM dan tidak dibolehkan membuat kerumunan maka sosialisasi hanya sekali dilakukan dan sisanya informasi tersebar sendirinya oleh masyarakat yang sudah menerima informasi atau yang sempat mengikuti sosialisasi yang pernah dilaksanakan.

KESIMPULAN

Implementasi Bantuan Langsung Tunai pada aspek komunikasi berjalan lancar dan jelas terlihat dari Transmisi dari pihak kecamatan ke masyarakat yang menerima informasi secara jelas dan merata karena meskipun sosialisasi yang diadakan di Kantor Camat terbatas namun pihakkecamatan memberikan arahan kepada Kepala Lingkungan yang ada di Kecamatan Binjai Kota unuk menginformasikan program ini ke masyarakatnya masing-masing secara berulang dan konsisten. Implementasi Bantuan Langsung Tunai

Ananda, N., & Lubis, M. A. (2022). Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 di Kec. Binjai Kota di Kota Binjai.

pada aspek sumber daya dilihat dari hasil wawancara dengan Informan Utama KPM menerima pelayanan dari staff pihak kecamatan, kelurahan dan kepala lingkungan dengan baik karena jumlah staff yang cukup dan memadai. KPM juga diarahkan langsung oleh TKSK dan Kepala Lingkungan saat menjalani prosedur Program Bantuan Langsung Tunai dan menerima dampak positif dari bantuan langsung tunai tersebut meskipun jumlah bantuan tidak besar namun dapat membantu KPM dalam menutupi beberapa kebutuhan sehari-hari KPM atau membantu modal usaha berjualan yang dimiliki oleh KPM. Implementasi Bantuan Langsung Tunai pada aspek Struktur Birokrasi dan Disposisi berjalan baik karena adanya SOP di Kecamatan tersebut dan program tersebut dibawahi langsung oleh Kasi Pelayanan Umum serta pihak kecamatan mengadakan fragmentasi dan membagi tanggung jawab terkait program ini kepada Dinas Sosial, BPBD dan Kepala Lingkungan, masyarakat mendapat pelayanan yang tepat dan responsif dilihat dari pernyataan KPM yang tidak kesulitan dalam mengikuti perkembangan proses Program Bantuan Langsung Tunai tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2006). Politik dan Kebijakan Publik. Bandung : AIPI Bandung
- Novianty, L. (2018). Implementasi Kebijakan Tarif Sewa Rusunawa Penjaringansari Tahap II dan III Surabaya. Jurnal. Diakses di repository.untag.sby pada tanggal 18 Agustus 2021 pada pukul 13.00 WIB
- Moleong, Lexy. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Siagian, Matias. (2012). Kemiskinan dan Solusi. Medan: PT Grasindo Monotama.
- Suud, Mohammad. (2006). Orientasi Kesejahteraan Sosial. Prestasi Pustaka. Jakarta.
- Winarno,Budi.(2005). Teori dan Proses Kebijakan Publik.Jurnal diakses di kertyawitaradya.wordpress.com pada tanggal 8 Oktober 2021 pukul 07.15